

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kata etika sudah melekat dalam setiap interaksi yang dilakukan manusia dengan sesamanya. Sebagai suatu subyek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dikerjakannya itu salah, benar, baik, atau buruk<sup>1</sup>. Setiap manusia selalu erat kaitannya dengan etika, baik ketika manusia tersebut berperilaku dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kerja. Manusia sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat lepas dari etika. Kehidupan manusia yang sarat akan kepentingan dan tujuan membuat manusia terkadang melupakan pentingnya keberadaan etika yang sebenarnya melekat pada diri mereka masing-masing. Manusia itu sendiri hendaknya selalu bertindak dan bekerja sesuai etika yang diterapkan di lingkungan kerja mereka masing-masing serta mengingat kembali etika tersebut agar ia dapat bertindak dan bekerja dengan mengutamakan etika daripada kepentingan dan tujuan masing-masing pribadi.

Kehidupan bermasyarakat sekarang sudah mengarah pada konflik-konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Konflik-konflik tersebut terjadi akibat dari kurangnya kesadaran manusia akan etika yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Nuh, S.H.,M.H.,Adv. *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, 2011, hlm xvii.

mengakibatkan tingkah laku manusia yang semakin tidak pada hakekatnya sebagai manusia yang beradab. Setiap tindakan dan perbuatan manusia cenderung mengarah terhadap penguasaan terhadap kepentingan yang meliputi diri mereka sendiri, sehingga memicu konflik antar manusia itu sendiri.

Suasana tersebut perlahan tapi pasti juga telah menyelimuti seluruh dunia profesi. Banyak dunia profesi belakangan ini yang ikut tercoreng kredibilitasnya akibat perilaku buruk salah satu oknum personil profesi itu sendiri. Keadaan seperti ini tentunya akan mereduksi rasa kepercayaan dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada pribadi manusia itu sendiri dari profesi yang telah memberikan kepercayaan tersebut. Rasa kepercayaan dan tanggung jawab yang telah memudar akibat telah ditinggalkannya fungsi etika dalam bertindak dan bekerja, dapat mengakibatkan lahirnya profesional yang tidak memiliki etika. Tolok ukur yang utama menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moralnya ketika menghadapi beragam kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya<sup>2</sup>.

Pelayanan di bidang hukum harus dilakukan secara profesional dan memiliki kredibilitas yang tinggi sesuai dengan profesi masing-masing. Para profesional hukum harus memiliki wawasan dan pengetahuan hukum yang mumpuni. Profesional hukum yang tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai akan mengakibatkan pelayanan di bidang hukum akan menjadi tidak sesuai dengan hukum itu sendiri, dengan demikian bukanlah keadilan

---

<sup>2</sup> ibid, hlm 134.

yang digapai melainkan ketidakadilan. Hal itu tentunya bertentangan dengan keberadaan profesional hukum itu sebagai alat untuk mencapai keadilan.

Ada beberapa profesi di dalam bidang hukum di Indonesia. Salah satu dari profesi hukum itu adalah polisi. Profesi sebagai polisi dalam dunia hukum tidak dapat dipisahkan dengan etika profesi polisi sebagai aparat penegak hukum dan aparat negara terkait dengan fungsi dari lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dan menegakkan hukum.” Memahami keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari fungsi Polri itu sendiri sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi negara, serta konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Berbagai masalah yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia, diantaranya<sup>3</sup>:

1. Kejahatan Nasional maupun Trans-Nasional;
2. Kejahatan kerah putih;
3. Masalah manajemen lalu lintas;
4. Ancaman teroris baik dalam maupun luar negeri;
5. Masalah pengamanan wilayah perbatasan baik darat maupun perairan;
6. Reformasi Polri yang masih berjalan.

---

<sup>3</sup>Ibid. hlm 77.

Berdasarkan kondisi permasalahan yang dihadapi kepolisian tersebut maka diperlukan profesionalitas serta kerja keras dari setiap anggota Polri agar dapat menjalankan Tugasnya sesuai yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai didalam masyarakat. Jika dilihat dari perspektif fungsi maupun lembaga, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib, dan tidak tentram. Kesemuanya itu dimaksudkan agar tugas pokok dari lembaga Polri seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat”. dapat tercapai. Pelaksanaan dari Pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang secara umum sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Masyarakat Indonesia dengan tingkat kemajemukan yang tinggi di segala sisi antara lain dari sisi suku bangsa, agama, organisasi politik, profesi,

dan lain-lain sarat akan kepentingan-kepentingan didalamnya. Perbedaan-perbedaan sebagai dampak yang ditimbulkan dari kemajemukan tersebut harus diwaspadai polisi agar dikemudian hari dapat dicegah terpicunya antar kepentingan dan apabila konflik telah terjadi polisi juga harus mampu mengatasi konflik tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum<sup>4</sup>. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “ Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka, oleh karena itu setiap professional kepolisian harus secara

---

<sup>4</sup>Dr.Sadjijono, SH., M.Hum. Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo Offset, 2010, hlm 53.

mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.

Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia beberapa tahun terakhir terus diuji akibat para oknum pejabatnya terlibat berbagai kasus pidana seperti Korupsi, pelanggaran HAM, penyuapan, illegal logging dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus-kasus pidana yang melibatkan oknum pejabat Polri seakan silih berganti menghiasi media massa cetak maupun elektronik beberapa tahun terakhir ini. Terhadap kasus-kasus yang melibatkan oknum pejabat Polri opini yang berkembang di masyarakat cenderung kearah anggota Polri yang justru melindungi pejabatnya yang melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya karena banyaknya kasus yang melibatkan anggota Polri menguap sebelum sampai kepersidangan. Masyarakat pasti masih mengingat ada kasus tentang pembunuhan direktur PT. Putra Rajawali Banjaran alm.Nazrudin Zulkarnaen yang melibatkan salah satu oknum perwira menengah Polri yang kala itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan. Oknum perwira menengah tersebut telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, tetapi oknum perwira tinggi yang disebutkan kombes tersebut dalam persidangan dan disebut ikut terlibat dalam skenario besar tersebut justru tidak diusut tuntas. Hal tersebut membuat terkejut masyarakat yang tidak menyangka bahwa seorang perwira berpangkat komisaris besar polisi dapat terlibat dalam pembunuhan berencana. Dalam kaitannya dengan kode etik, perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya dihindari oleh anggota Polri. Etika dalam hubungan dengan masyarakat

mengatur bahwa anggota Polri tidak boleh melakukan perbuatan tercela termasuk terlibat dalam kriminal murni.

Kasus lain yang tidak kalah mengejutkan adalah korupsi dana pengamanan pilkada Jawa Barat yang melibatkan perwira tinggi Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji yang pada waktu pelaksanaan pilkada Jawa Barat menjabat Kapolda Jawa Barat, sebelum ia menempati posisi Kabareskrim Mabes Polri. Kasus Susno Duadji sampai sekarang juga belum terlihat kelanjutan proses hukumnya.

Berkaca dari berbagai kasus yang timbul, seharusnya Polri perlu memulai langkah baru dengan menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus-kasus korupsi, HAM, illegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya. Keanehan proses hukum kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh Polri, bukan lagi sekadar menyangkut oknum, melainkan Polri sebagai institusi. Untuk itu, Kepala Polri harus memulai tradisi baru untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan berotak cemerlang.

Polisi sebagai salah satu diantara penegak hukum lainnya, memiliki peran dalam membantu tegaknya hukum di Indonesia, pada kenyataannya. masih ada anggota polisi yang justru melakukan pelanggaran hukum dalam upayanya menegakan hukum, mulai dari tindakan administratif sampai dengan tindakan pidana yang kemudian justru merugikan masyarakat.



Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji etika profesi Kepolisian, sebab profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Profesi demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah: “Apakah Kode Etik Kepolisian Sudah Berfungsi dalam Mencegah Penyalahgunaan Profesi Kepolisian demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang polisi dalam menjalankan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum di bidang Kepolisian di Indonesia yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian Republik Indonesia serta masyarakat pada umumnya tentang pentingnya kode etik Kepolisian dalam perannya sebagai aparat penegak hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Demi Terselenggaranya Penegakkan Hukum merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Profesi Demi Terselenggaranya Penegakkan Hukum Pidana dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Fungsi Kode Etik Kepolisian. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Kode Etik Profesi Polri**

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan atau dilarang atau tidak patut dilakukan anggota Polri.

##### **2. Kepolisian**

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

### 3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, dan perbuatan atau penyelewengan kewenangan baik kekayaan maupun jabatannya<sup>6</sup>.

### 4. Wewenang

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak<sup>7</sup>.

### 5. Penegakkan Hukum:

Berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya, serta penegakannya adalah produk dari perjuangan manusia<sup>8</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Kepolisian. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan melalui hukum positif.

### 2. Sumber Data

---

<sup>5</sup>Sadjijiono, op.cit., hlm 54

<sup>6</sup>[www.kamusbahasaIndonesiaonline.org](http://www.kamusbahasaIndonesiaonline.org)

<sup>7</sup>[www.kamusbahasaIndonesiaonline.org](http://www.kamusbahasaIndonesiaonline.org)

<sup>8</sup> Ibid, hlm 165.

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dan data primer yang terdiri dari:

a. Data Sekunder

1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Primer) antara lain:

a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

2) Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel tentang kode etik Kepolisian, tugas dan wewenang Kepolisian, yang bertujuan untuk mengetahui Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang demi Terselenggaranya Penegakkan Hukum Bahan-bahan hukum tersier antara lain:

a) Kamus Bahasa Hukum

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber.

3. Narasumber

Dalam Penelitian Hukum ini penulis mengadakan wawancara pada narasumber dari Kepala Kepolisian Sektor Depok Barat dan Perwira Unit Intelkam Kepolisian Sektor Depok Barat untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

**H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun kerangka isi penulisan hukum ini adalah sebagai berikut;

**BAB I                      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi

**BAB II                      FUNGSI    KODE    ETIK    KEPOLISIAN    DALAM  
MENCEGAH    PENYALAHGUNAAN    WEWENANG  
POLISI**

Dalam bab ini menguraikan tentang Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Polisi yang terdiri dari Tinjauan Umum Kode Etik Kepolisian yang menguraikan tentang Pengertian Kode Etik Profesi, Pengertian Kode Etik Kepolisian, Fungsi Kode Etik, Arti Penting Kode Etik Profesi, dan Kelemahan Kode Etik Profesi. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menguraikan tentang Pengertian Kepolisian, Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Demi Terselenggaranya Penegakan Hukum yang menguraikan tentang Arti Penting Kode Etik Profesi Bagi Kepolisian, Pelanggaran Terhadap Kode Etik yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian., Fungsi Kode Etik Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Demi Terselenggaranya Penegakan Hukum

### BAB III

### PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab II sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan

dengan masalah yang ada. Penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.

